

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku / Literatur

- Afan Gaffar, 2004, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, Yogyakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- C.S.T.Kansil, 1984, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Efriza, 2016, *Kekuasaan Politik: Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik*, Intrans Publishing, Malang.
- Fadillah Putra, 2003, *Partai Politik Dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fitra Arsil, 2017, *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Hanta Yuda, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jazim Hamidi (et.al), 2009, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2013, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Luky Sandra Amalia (et.al), 2017, *Partai Dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, 2016, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, UB Press, Malang.
- Patrialis Akbar, 2013, "*Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*", Total Media, Yogyakarta.
- Richard S. Katz, William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi, Nusa Media, Bandung.
- Saldi Isra, 2014, *10 Tahun Bersama SBY: Catatan dan Refleksi Dua Periode Kepemimpinan*, Kompas, Jakarta.
- Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusa Djuyandi, 2017, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

C. Jurnal

[Adi Atma Dewantara](#), [I Gede D.E.](#), [Dewa Gde Rudy](#), “Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik Dalam Membentuk Pemerintahan Yang Efektif”, *Kertha Negara*, IV (Februari 2016).

Eddy Purnama, “Lembaga Perwakilan dan Checks and Balances Dalam Kekuasaan Negara”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, LXIII (Agustus, 2014).

Efriza, “Sistem Presidensial Pasca Amandemen Undangundang Dasar 1945; Studi Kasus Kepemimpinan Presiden Sby Dan Jokowi”, *Jurnal Renaissance*, I (Mei, 2016).

Ellya Rosana, “Partai Politik Dan Pembangunan Politik”, *Jurnal TAPIS*, I (Januari, 2012).

Hezky Fernando Pitoy, “Mekanisme Checks and Balances Antara Presiden dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, *Lex et Societatis*, V (Juni, 2014).

Ibnu Sina Chandranegara, “Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, III (September, 2016).

Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indoensia”, *Jurnal Cita Hukum*, I (Desember, 2013).

Khumaidi, “Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Perspektif Desentralisasi”, *Jurnal Kebangsaan*, I (September, 2012).

Leli Salman Al Farisi, “Partai Politik Dan Demokrasi: Masihkah Partai Politik Sebagai Pilar Utama Dalam Demokratisasi Pemerintahan Indonesia?”, *Jurnal Aspirasi*, I (Agustus, 2015)

M. Arsyad Mawardi, “Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, *Jurnal Hukum*, I (Januari, 2008).

R. Guntur Prakoso Dewandaru, Ratna Herawati, Untung Sri Hardjanyo, “Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat”, *Diponegoro Law Journal*, III (2016).

R. Widya Setiabudi Sumadinata, "Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014", *Jurnal Wacana Politik*, I (Oktober 2016).

Samugyo Ibnu Redjo, "Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan", *Governance*, I (November, 2010).

Syofyan Hadi, "Prinsip Checks and Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia", *Mimbar Keadilan*, I (Januari, 2014).

Yusa Djuyandi, "Koalisi Partai Politik Untuk Demokrasi: Membangun Demokrasi Kebangsaan Dalam Nuansa Pluralisme", *Humaniora*, II (Oktober, 2011).

D. Skripsi

Anita Delviana, 2014, "*Analisis Yuridis Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia*", Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar.

E. Data Elektronik

Adiatmaputra Fajar Pratama, *Yusril Nilai Perpu Pembubaran Ormas Melanggar Undang-Undang Dasar 1945*, 12 Juli 2017, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/12/yusril-nilai-perpu-pembubaran-ormas-melanggar-undang-undang-dasar-1945?page=all>, diakses pada pukul 00.51 tanggal 12 Maret 2018.

Adi Putra, *Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertolak Belakang Dengan Nilai-nilai Pancasila*, 16 Juli 2017, <http://www.rmol.co/read/2017/07/16/299255/Perppu-Nomor-2-Tahun-2017-Bertolak-Belakang-Dengan-Nilai-nilai-Pancasila->, diakses pada pukul 18.30 tanggal 23 Februari 2018.

Ahmad Thorik, *PAN Bergabung Jokowi Makin Kuat di DPR*, 02 September 2015, <http://news.detik.com/berita/3007970/pan-bergabung-jokowi-makin-kuat-di-dpr>, diakses pada pukul 20.02 tanggal 23 Februari 2018.

Alit Amarta Adi, *Trias Politica dan Checks and Balances Ala Indonesia*, 26 Juni 2015, http://www.kompasiana.com/alit.amarta/trias-politica-dan-checks-and-balances-a-la-indonesia_550043c28133117c1bfa7469, diakses pada pukul 16.37 tanggal 16 April 2017.

Bangkit Pos, *Ini Pelanggaran Undang-undang Oleh Pemerintahan Jokowi Menurut Pengamat*, 14 Agustus 2017, <http://www.bangkitpos.com/2017/08/ini-pelanggaran-undang-undang-oleh.html>, diakses pada pukul 18.30 tanggal 23 Februari 2018.

- Bilal Ramadhan, *Perincian Jumlah Pendukung dan Penolak Perppu Ormas di DPR*, 24 Oktober 2017, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/24/oybr2d330-perincian-jumlah-pendukung-dan-penolak-perppu-ormas-di-dpr>, diakses pada pukul 02.02 tanggal 12 Maret 2018.
- Damang, *Pemisahan Kekuasaan Vs Pembagian Kekuasaan*, 9 Januari 2013, <http://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasaan-vs-pembagian-kekuasaan.html>, diakses pada pukul 01.28 tanggal 16 April 2017.
- Denny Indrayana, *Presiden dan Lembaga Kepresidenan*, 24 Desember 2013, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/12/24/presiden-dan-lembaga-kepresidenan>, diakses pada pukul 18.03 tanggal 8 Desember 2017.
- Devira Prastiwi, *Surat Pengajuan Hak Angket Status Ahok Dibacakan di Paripurna DPR*, 23 Februari 2017, <http://news.liputan6.com/read/2866362/surat-pengajuan-hak-angket-status-ahok-dibacakan-di-paripurna-dpr>, diakses pukul 01.25 tanggal 26 Maret 2017.
- Dewi Irmasari, *Pemerintah Resmi Terbitkan Perppu 2/2017 soal Ormas*, 12 Juli 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3557028/pemerintah-resmi-terbitkan-perppu-22017-soal-ormas>, diakses pada pukul 17.21 tanggal 11 Maret 2018.
- Dhemas Reviyanto, *Mendagri Tunggu Keputusan Jaksa Agung untuk Berhentikan Ahok*, 28 Mei 2018, <https://metro.tempo.co/read/879432/mendagri-tunggu-keputusan-jaksa-agung-untuk-berhentikan-ahok>, diakses pada pukul 02.19 tanggal 25 Februari 2018.
- Dian Ramdhani, Mula Akmal, Ichsan, *Kontrol DPR Ke Pemerintah Melemah*, 21 Oktober 2016, <http://koran-sindo.com/page/news/2016-10-21/0/3>, diakses pada pukul 02.32 tanggal 5 Maret 2018.
- Dieqy Hasbi Widhana, *Wahyudi Djafar: Perppu Ormas Tak Sejalan Dengan Negara Hukum*, 21 Juli 2017, <https://tirto.id/perppu-ormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83>, diakses pada pukul 17.50 tanggal 11 Maret 2018.
- Esty Ekawati, *Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia pada Pilpres 1999, 2004, 2009 dan 2014*, <file:///C:/Users/asus/Downloads/PDF%20Kuliah%20Umun%20Esty%20LIPI.pdf>, diakses pada pukul 16.30 tanggal 24 Desember 2017.

<http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, diakses pada pukul 01.53 tanggal 11 Maret 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt525d4a626827f/prosedur-penolakan-dan-pencabutan-perpu>, diakses pada pukul 01.34 tanggal 12 Maret 2018.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37458/Chapter%20II.pdf;jsessionid=3BA78E833BC188A93CA48516DEA09FC4?sequence=3>, diakses pada pukul 02.53 tanggal 25 Desember 2017.

Ihasanuddin, *Jokowi Mengaku Undang PAN Dalam Pertemuan Koalisi Di Istana*, 26 Juli 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/11192311/jokowi-mengaku-undang-pan-dalam-pertemuan-koalisi-di-istana>, diakses pada pukul 00.56 tanggal 11 Maret 2018.

Ikrar Nusa Bhakti (P2 Politik LIPI), *Konsep Pemerintahan Koalisi*, 15 Desember 2008, <http://lipi.go.id/berita/konsep-pemerintahan-koalisi-/2085>, diakses pada pukul 16.48 tanggal 24 Desember 2017.

Indah Mutiara Kami, *3 Kali Bongkar Pasang, Ini Formasi Terbaru Kabinet Kerja Jokowi-JK*, 15 Oktober 2016, <https://news.detik.com/berita/3321413/3-kali-bongkar-pasang-ini-formasi-terbaru-kabinet-kerja-jokowi-jk>, diakses pukul 00.24 tanggal 11 Maret 2018.

Kurnia Sari Aziza, *Kaleidoskop 2016: "Timeline" Penetapan Ahok sebagai Terdakwa Penodaan Agama*, 14 Desember 2016, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/14/07030021/kaleidoskop.2016.timeline.penetapan.ahok.sebagai.terdakwa.penodaan.agama>, diakses pada pukul 18.40 tanggal 23 Februari 2018.

Laurencius Simanjuntak, *Ditinggal Golkar dan PAN, KMP akhirnya bubar juga*, 5 Februari 2016, <https://www.merdeka.com/politik/ditinggal-golkar-dan-pan-kmp-akhirnya-bubar-juga.html>, diakses pada pukul 02.10 tanggal 10 Maret 2018.

Manik Sukoco, *Akankah Jokowi Langgar 2 Undang-Undang Demi Ahok?*, 11 Februari 2017, http://www.kompasiana.com/maniksukoco/akankah-jokowi-langgar-2-undang-undang-demi-ahok_589e4da6d9937321048b456b, diakses pukul 19.15 tanggal 23 Februari 2018.

Nabilla Tashandra, *Fraksi Pemerintah Tolak Hak Angket Status Ahok*, 14 Februari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/23483631/fraksi.pemerintah.tolak.hak.angket.status.ahok?page=all>, diakses pukul 01.41 tanggal 26 Maret 2017.

Nuraeni T, *Trias Politica Di Indonesia Antara Separation Of Power Dengan Distribution Of Power Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, 24 November 2011, http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/124_TRIAS%20POLITICA.pdf, diakses pada pukul 01.50 tanggal 16 April 2017.

Nur Hidayah, *Partai Politik*, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309997/pendidikan/PARTAI+POLITIK.pdf> diakses pada pukul 18.38 tanggal 20 Maret 2018.

Rahmat Nur Hakim, *Status Ahok Munculkan Dinamika Hak Angket di DPR...*, 14 Februari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/07441161/status.ahok.munculkan.dinamika.hak.angket.di.dpr.>, diakses pukul 19.47 tanggal 23 Februari 2018.

Rina Widiastuti, *DPR Sahkan Perpu Ormas meski Fraksi Gerindra, PKS, PAN Menolak*, 24 Oktober 2017, <https://nasional.tempo.co/read/1027508/dpr-sahkan-perpu-ormas-meski-fraksi-gerindra-pks-pan-menolak>, diakses pada pukul 01.59 tanggal 12 Maret 2018.

Saldi Isra, *Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*, 9 Mei 2010, <http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/417-problematik-koalisi-dalam-sistem-presidensial.html>, diakses pada pukul 01.42 tanggal 1 Mei 2017.